

IMPLEMENTASI PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA OLEH BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA (BKBKS) DI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

Astri Alviani¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) pada Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data primer mengenai Implementasi Program Bina Keluarga Remaja oleh BKBKS di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dapat dilihat dari proses program BKR yang meliputi sosialisasi, pembentukan pengurus, pelatihan kader dan kegiatan. Sosialisasi berfungsi untuk mengenalkan program BKR kepada masyarakat. Pembentukan pengurus berfungsi untuk mempermudah dan membantu masyarakat memahami tentang program Bina Keluarga Remaja (BKR). Pelatihan kader berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta keahlian untuk para kader BKR. Kegiatan bertujuan menumbuh kembangkan pola pikir remaja, memperbaiki moral remaja saat ini yang semakin parah. Selain itu kegiatan dari BKR ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam membina anak dan remaja. Tujuan dalam pelaksanaan program Bina keluarga Remaja (BKR) ialah untuk meningkatkan pengetahuan anggota keluarga terhadap kelangsungan perkembangan anak remaja, diantaranya tentang pentingnya hubungan satu keluarga dalam rangka pembinaan kepribadian anak dan remaja. Menumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang orang tua dengan anak dan remajanya, atau sebaliknya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak sehingga timbul rasa hormat dan saling menghargai satu sama lain.

Kata kunci: *Implementasi, BKBKS*

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: astrialviany94@gmail.com

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami ledakan populasi yang luar biasa. Laporan kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa salah satu akar masalah dari tingginya laju pertumbuhan penduduk adalah banyak terjadinya pernikahan pada usia dini. Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah usia minimal untuk melakukan pernikahan, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (masih berusia remaja) (BKKBN, 2013). Maraknya pernikahan dini mengakibatkan laju perkembangan penduduk semakin pesat, karena dengan banyaknya pasangan yang menikah muda otomatis tingkat kesuburan pun tinggi.

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 berjumlah 240.7 juta jiwa dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 254,9 juta jiwa, lalu jumlah penduduk di Kota Samarinda tahun 2010 sebanyak 726.223 jiwa dan pada tahun 2015 berjumlah 883.838 jiwa. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk membenahi fasilitas publiknya. Tingkat pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Minimnya pengetahuan mengenai pertumbuhan penduduk akan berdampak pada peningkatan angka kematian ibu hamil dan bersalin, angka kehamilan yang tidak diinginkan, serta angka kejadian penyakit menular seksual. (BKKBN, 2013)

Berdasarkan data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), dalam upaya membangun penduduk yang berkualitas maka pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia. Salah satu upaya kebijakan pemerintah adalah membuat program GenRe (Generasi Berencana) yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Program Bina Keluarga Remaja merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga dan mewujudkan peningkatan kualitas remaja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dimana dalam pengelolaan programnya didasarkan pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 109/PER/F2/2012. Program Bina Keluarga Remaja (BKR) ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya Sumber Daya Manusia potensial melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua dalam keluarga. Selain itu, dengan adanya program BKR ini diharapkan dapat mengatasi

meningkatnya kecenderungan perilaku seks bebas dikalangan remaja. (BKKBN, 2013)

Kelompok Bina Keluarga Remaja adalah Suatu Kelompok / wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10 - 24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja dalam rangka memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur anggota kelompok.

Program BKR telah dibentuk di beberapa Provinsi dan beberapa Kota, namun akhir-akhir ini Program BKR tidak berjalan dengan baik terutama di Kota Samarinda, dari 10 Kecamatan yang berada di Kota Samarinda Kecamatan Sungai Pinang tidak mengalami kemajuan yang pesat dalam pelaksanaan Program BKR hal ini dikarenakan Kecamatan Sungai Pinang yang baru saja terbentuk sehingga mengakibatkan terhambatnya penerapan Program BKR tersebut.

Ada beberapa Kecamatan di Kota Samarinda yang telah menerapkan program Bina Keluarga Remaja, ada pula yang baru disosialisasikan, ada yang sama sekali belum tersentuh program BKR. Salah satu sasaran yang akan dicapai program BKR ialah dapat membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Melalui kelompok BKR setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Oleh Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.**”

Kerangka Dasar Teori

Konsep Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi

Menurut Webster (dalam Solichin, 2004:64) mengatakan implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Guntur Setiawan (2004 : 39) dalam bukunya yang berjudul “implementasi dalam birokrasi pembangunan” mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksana sebagai berikut “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”

Kemudian menurut Hanifah Harsono (2002:67) mengatakan Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.

Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan, penerapan atau pertemuan. Jadi implementasi ialah suatu penerapan keputusan kebijaksanaan berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan oleh badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Menurut Dwiyanto Indiahono (2009 : 143) mengatakan Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2001:68) arti implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Model – Model Implementasi Kebijakan

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama ini adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975 : 27-28). Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.

2. Model George C. Edward III

Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Dalam penekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan

3. Model Marrie S. Grindle

Model Implementasi kebijakan publik ini menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup.

Konsep Kependudukan

Penduduk dalam bukunya Handayani (2010:2) adalah semua orang yang mendiami suatu daerah dalam suatu waktu atau jangka waktu tertentu.

Menurut Hatmadji (2003:58) mengemukakan bahwa kebijakan pembangunan kependudukan adalah kegiatan dan program yang dibuat untuk menunjang pencapaian tujuan ekonomi, sosial, demografi, politik, dengan cara mempengaruhi variabel-variabel demografi yang penting yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk, distribusi geografi dan karakteristik demografinya.

Selanjutnya Hatmadji (2003:55) mengemukakan bahwa kebijakan kependudukan tidak saja dimaksud untuk mempengaruhi aspek kuantitas (jumlah, komposisi, distribusi) penduduk tetapi juga aspek kualitas penduduk masa yang akan datang. Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan yaitu : demografi (pertumbuhan, komposisi, distribusi, dan mobilitas penduduk) serta dimensi sosial ekonomi, politik dan ekologi (pendidikan, kesehatan, kebebasan dan kualitas hidup).

Konsep Keluarga Berencana

Menurut Entjang (dalam Ritonga, 2001 : 244) mengatakan keluarga berencana adalah suatu upaya manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum dan moral Pancasila untuk kesejahteraan keluarga.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 menyebutkan bahwa Keluarga berencana merupakan gerakan untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera dan bahagia melalui penurunan tingkat kelahiran secara bermakna. Keluarga berencana merupakan upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera.

Program Keluarga Berencana

Adapun yang dimaksud dengan Keluarga Berencana adalah salah satu dari lima aspek kesehatan reproduksi. Empat aspek lain adalah kesehatan ibu, kesehatan anak, usia bawah lima tahun (*balita*), kesehatan reproduksi remaja dan infeksi menular seksual (*IMS*) termasuk HIV / AIDS. (Hanafi Hartanto, 1996 : 20)

Program Keluarga Berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi. Disamping itu juga untuk penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia perkawinan yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal melahirkan anak, pengaturan kehamilan serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (Syarief, 2007 : 93)

Wirosuhardjo (1981 : 147) mengemukakan bahwa kegiatan keluarga berencana adalah program kependudukan dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan ibu dan anak yang akan menurunkan angka kematian bayi juga merupakan program kependudukan.

Program Bina Keluarga Remaja

Menurut BKKBN (2013 : 12), dalam pelaksanaan program pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orangtua dalam melakukan pembinaan terhadap remaja. Program ini dilaksanakan mengacu pada Pedoman Operasional Ketahanan Keluarga. Disamping itu, program ini diarahkan pula untuk dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota BKR.

Program ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 47/HK.010/B5/2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2010-2014 dan Addendum Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana No. 133/PER/B1/2011 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dalam Addendum tersebut dinyatakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun.
2. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja.

Dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja (BKR), maka perlu diberikan batasan pengertian hal-hal sebagai berikut :

- a. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
- b. Remaja adalah Orang Muda yaitu penduduk usia 10-24 tahun. Remaja sebagai sasaran program GenRe adalah penduduk usia 10-24 tahun yang belum menikah.
- c. Keluarga Remaja adalah keluarga yang memiliki anak remaja usia 10-24 tahun, dan belum menikah.
- d. Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun. BKR bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok.
- e. Komunikasi orangtua dan remaja adalah informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator (orangtua) kepada komunikan (remaja)

yang mencakup penyampaian nilai, standar, dan sikap orangtua mengenai suatu isu.

- f. KIE adalah kegiatan penyampaian informasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam program Kependudukan dan Keluarga Berencana. (BKKBN,2013 : 6-10)

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri, yaitu dimana diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain.

Fokus Penelitian

1. Implementasi kebijakan Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) dalam Program Bina Keluarga Remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dapat dilihat dari :
 - a) Sosialisasi
 - b) Pembentukan Pengurus
 - c) Pelatihan Kader
 - d) Kegiatan
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Oleh di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Implementasi Program Bina Keluarga Berencana (BKR) Oleh Badan Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera (BKBKS) di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

Proses Pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja

a) Sosialisasi

Dengan adanya sosialisasi tentang program Bina Keluarga Remaja (BKR) maka diharapkan orang tua dan anggota keluarganya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja agar berperan dalam rangka peningkatan kesetaraan, pembinaan dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok serta berkembangnya kegiatan BKR ini disetiap Kecamatan atau kelurahan.

Proses sosialisasi dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja di Kecamatan Sungai Pinang belum terlaksanakan dengan baik di karenakan Kecamatan Sungai Pinang sendiri masih baru terbentuk selain itu juga dapat dilihat dari anggota UPTB yang ada di Kecamatan Sungai Pinang yang masih membutuhkan dukungan dari stakeholder seperti lurah dan RT agar proses

dalam pelaksanaan Program BKR terlaksanakan dengan baik. Selain itu pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja masih belum terealisasikan dengan baik, dikarenakan hanya sekali saja dilaksanakan sosialisasi. Hal ini menyebabkan kurangnya minat warga untuk mengikuti program BKR dan ini terjadi dikarenakan kurangnya keaktifan anggota dari pihak BKBKS serta kurangnya pengaruh pihak dari RT dan Lurah setempat.

Di Kecamatan Sungai Pinang bahwa sangat dibutuhkan dalam setiap program. Maka saat ini sosialisasi harus lebih dilaksanakan agar masyarakat atau warga setempat mengetahui tujuan dari adanya program tersebut. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal karena hanya dilakukan satu kali. Akibatnya tidak ada tindak lanjut dari Program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang disosialisasikan sehingga program tersebut belum efektif dan efisien.

Seharusnya Sosialisasi bisa berlangsung secara tatap muka, tapi bisa juga dilakukan dalam jarak tertentu melalui sarana media, atau surat-menyurat, bisa berlangsung secara formal maupun informal, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sosialisasi dapat dilakukan demi kepentingan orang yang melakukan sosialisasi, sehingga kedua kepentingan tersebut bisa sepadan ataupun bertentangan.

Penulis menemukan masih terdapat kekurangan pada sosialisasi terhadap program Bina Keluarga Remaja sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya kurang berjalan maksimal, yaitu masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengikuti program BKR tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya keaktifan anggota dari BKBKS untuk mensosialisasikan program tersebut, selain itu kurangnya pengaruh dari ketua RT dan Lurah.

b) Pembentukan Pengurus

Pembentukan pengurus sebuah organisasi dilaksanakan sesuai dengan masa bhakti pengurus, namun apabila sesuatu hal dilaksanakan cepat sebelum masa bhakti kepengurusan habis atas keinginan 2/3 masyarakat dan atas musyawarah 2/3 ketua RT. Adapun tata cara pembentukan pengurus organisasi adalah mengadakan musyawarah masyarakat untuk membentuk kepengurusan.

Pembentukan pengurus dalam program Bina Keluarga Remaja masih terus dilaksanakan. Selain itu juga pembentukan pengurus membantu masyarakat untuk lebih mudah memahami tentang program Bina Keluarga Remaja (BKR) tersebut.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembentukan pengurus dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja belum terjalankan secara merata dan dalam pembentukan pengurus di Kecamatan Sungai Pinang terdapat 1 kelurahan yang mana sudah membentuk kepengurusan untuk program BKR akan tetapi masih ada kelurahan yang belum tersentuh oleh pembentukan pengurus kemudian hal itu juga terkendala pada SK (Surat

Keputusan) yang belum dikeluarkan sehingga membuat kepengurusan belum diakui.

c) *Kegiatan*

Kegiatan dari program Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam membina anak dan remaja yang berada pada masa transisi dari anak-anak menjadi remaja. Pada masa ini remaja mengalami berbagai gejala dan perubahan fisik dan non-fisik, bila tidak mendapat pembinaan yang baik dari orangtuanya mereka akan mencari informasi dan sumber-sumber yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan penyelenggaraan kelompok BKR itu sendiri pembentukan kelompok BKR, peningkatan kapasitas, pelayanan kelompok BKR dan penutup. Tujuan dari adanya kegiatan program BKR ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam membina anak dan remaja yang berada pada masa transisi dari anak menjadi remaja. Dari kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan diperlukan kerjasama antara kader serta orangtua remaja agar kegiatan dari kelompok BKR berjalan dengan lancar semua kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik di Kecamatan Sungai Pinang.

Kegiatan dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja (BKR) itu sangat baik dalam menumbuh kembangkan pola pikir remaja, memperbaiki moral remaja saat ini yang semakin parah. Selain itu juga kegiatan dari BKR ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam membina anak dan remaja.

d) *Pelatihan Kader*

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) pelatihan kader sangatlah dibutuhkan untuk mengembangkan potensi serta keahlian para kader untuk menjalankan kegiatan dalam Program Bina Keluarga Remaja itu sendiri. Menurut Simamora (2004 : 273) pelatihan adalah *Training* merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sedangkan kader adalah anggota masyarakat yang melaksanakan kegiatan secara sukarela. Seperti halnya pernyataan menurut simamora tersebut maka pelatihan kader itu sendiri ialah proses pembelajaran untuk memperoleh keahlian, serta sikap dalam meningkatkan kinerja karyawan atau kinerja kader-kader BKR itu sendiri.

Pelatihan kader ini dilaksanakan agar para kader-kader dari kelompok BKR ini bisa membina dan memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang cara mengasuh dan membina anak remajanya dengan baik dan benar. Kader BKR sendiri adalah anggota masyarakat yang melaksanakan kegiatan BKR secara sukarela, dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang cara mengasuh dan membina anak remajanya dengan baik dan benar.

Proses dalam pelaksanaan program BKR ditingkat Kecamatan khususnya Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dapat dikatakan kurang berjalan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang yang belum mengetahui adanya program Bina Keluarga Remaja (BKR) tersebut, selain itu masih kurangnya pemahaman masyarakat akan proses dalam pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR). Kurangnya pemahaman masyarakat di akibatkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat kurangnya pengenalan tentang adanya program Bina Keluarga Remaja (BKR) hal itulah yang menjadi salah satu penyebab pelaksanaan program BKR tidak terjalankan dengan baik.

Dalam proses program Bina Keluarga Berencana (BKR) yang ada di Kecamatan Sungai Pinang tidak ada tingkat kesulitan, proses pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja (BKR) berjalan dengan lancar tanpa proses yang berbelit sehingga masyarakat mengerti meskipun tidak keseluruhan, dari proses tersebut juga tetap mengalami perubahan perlahan. Seperti yang dikemukakan oleh Soewarno Handyaningrat (2007:21) bahwa proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus.

Pada proses pelaksanaan dalam program Bina Keluarga Remaja (BKR), Kader-kader telah bersikap disiplin, sopan dan ramah dalam memberikan pengetahuan tentang proses pelaksanaan program BKR. Karena para kader-kader sudah melakukan pelatihan sebelumnya, tugas dari kader BKR itu sendiri ialah:

- a. Melakukan pendataan keluarga yang memiliki remaja.
- b. Memberikan penyuluhan kepada keluarga remaja untuk ikut aktif menjadi anggota BKR.
- c. Menyusun jadwal kegiatan.
- d. Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan orangtua yang memiliki remaja dalam kegiatan BKR.
- e. Menjadi fasilitator dalam pertemuan.
- f. Kunjungan rumah apabila diperlukan.
- g. Merujuk orangtua remaja yang permasalahannya tidak dapat ditangani oleh kader BKR ketempat pelayanan yang lebih sesuai dengan permasalahannya, seperti Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau Lembaga konsultasi yang lain.
- h. Pencatatan dan pelaporan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Oleh BKBKS di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

1. Kurangnya Anggaran.

Pelaksanaan Implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) terkendala dengan kurangnya anggaran. Alokasi anggaran kesehatan masih belum tepat sehingga menghambat berbagai program, termasuk Bina

Keluarga Remaja. Anggaran pemerintah terbesar masih untuk gaji dan pembangunan fisik, sedangkan untuk biaya operasional sangat sedikit. Program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang sebenarnya sangat penting dalam pembangunan fisik, mental, serta nilai moral anak remaja belakangan ini semakin diabaikan. Remaja saat ini sangat memperhatikan maka dari itu sebagai aparatur pemerintah sebaiknya lebih fokus terhadap kehidupan remaja sebagai generasi selanjutnya untuk menjadikan mereka lebih baik lagi dari sekarang.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program KB

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) mengakibatkan program BKR tidak berjalan dengan baik. Sumber Daya Manusia (SDM) juga disebut dengan tenaga kerja, seperti diungkapkan Ulber Silalahi (2011 : 238) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia juga dinamakan sebagai tenaga kerja, personalia adalah orang yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia merupakan hal yang terpenting dalam jalannya suatu kegiatan atau organisasi termasuk dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja (BKR). Jika SDM tidak memadai maka dalam setiap kegiatan dalam pelaksanaan program BKR itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik sebab tidak ada yang mengontrol kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Kesimpulan

1. Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, dilihat dari :

A. Proses dalam pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR).

- a) Sosialisasi, sosialisasi dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja masih belum terealisasikan dengan baik, dikarenakan hanya sekali saja dilaksanakan sosialisasi. Hal ini menyebabkan kurangnya minat warga untuk mengikuti program BKR dan ini terjadi dikarenakan kurangnya keaktifan anggota dari pihak BKBKS serta kurangnya pengaruh pihak dari RT dan Lurah setempat.
- b) Pembentukan Pengurus, pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja belum terjalankan secara merata dan dalam pembentukan pengurus di Kecamatan Sungai Pinang terdapat 1 kelurahan yang mana sudah membentuk kepengurusan untuk program BKR akan tetapi masih ada kelurahan yang belum tersentuh oleh pembentukan pengurus kemudian hal itu juga terkendala pada SK (Surat Keputusan) yang belum dikeluarkan sehingga membuat kepengurusan belum diakui.
- c) Kegiatan, kegiatan dari Program Bina Keluarga Remaja belum terlaksanakan dengan baik di karenakan sosialisasi yang dilakukan

hanya sekali dan para pelaksana masih belum mengetahui kegiatan apa yang harus di lakukan.

- d) Pelatihan Kader, pelatihan kader dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja (BKR) itu sangatlah penting untuk menumbuh kembangkan keahlian, meningkatkan kemampuan dan untuk memajukan program BKR serta itu juga untuk meningkatkan keterampilan bagi para kader dalam menunjang pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja.
2. Faktor penghambat Implementasi Program Bina Keluarga Remaja di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda antara lain ialah kurangnya anggaran sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program Keluarga Berencana. Faktor penghambat terakhir adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan program KB tidak akan berjalan dengan lancar jika SDM kurang, SDM sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan selain itu juga SDM dibutuhkan agar kegiatan yang diinginkan berjalan dengan baik.

Saran

1. Diharapkan dalam pelaksanaan program BKR harus lebih memperhatikan dan meningkatkan masalah anggaran karena kurangnya anggaran akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program BKR. Selain itu juga berpengaruh terhadap kurangnya SDM (sumber daya manusia) karena kurangnya SDM dalam pelaksanaan program BKR akan mengakibatkan Program BKR tidak berjalan dengan baik kemudian dalam pelaksanaan program tersebut Sumber Daya Manusia sangatlah dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan kegiatan yang di harapkan berjalan dengan baik.
2. Hendaknya dalam pelaksanaan sosialisasi Program BKR harus lebih sering dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang pentingnya program BKR. Selain itu sosialisasi yang dilakukan harus lebih menarik minat orang tua untuk mengetahui lebih jauh tentang program BKR dengan membuat spanduk, brosur dan gambar-gambar.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Handayani, Sri, 2010. *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*, Pustaka Rihama, Yogyakarta.
- Hartanto, Hanafi, 1996. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hatmadji, Sri Harijati. 2003. *Kebijakan Kependudukan Di Indonesia : Anlisis Data Sensus Dan Survei*, Lembaga Demografi-FEUI, Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 200. *Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Namawi, Ismal. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi, Advokasi teori dan Praktek)*, PMN, Surabaya.

- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*, Gramedia, Jakarta.
- Kriyanto, Rachmat. 2010. *Teknis Praktis Riset Komunikasi Edoso Pertama Cetakan Ke. Kencana*, Jakarta.
- Miles dan Huberman, 1992. *Analisis Data Kuantitatif*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Syarief, Sugri, MPA, Dr. 2007. *Tiga Tahun Pelaksanaan KB Era Desentralisasi dan Arah Kebijakan Program KB Nasional*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Wirosuhardjo, Kartomo. 1981. *Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Demografi FE- Universitas Indonesia, Jakarta.